



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BENYAMIN KOAMESAH
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 641474

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 15.905.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 874 m2/150 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 640 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 453.000.000
3. Tanah Seluas 782 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000
4. Tanah Seluas 300000 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN Rp. 15.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 223.750.000**

1. MOTOR, HONDA GL MAX Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000
5. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
6. MOBIL, TOYOTA RUSH TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 21.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	16.169.250.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.169.250.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.